

## Model Keterlibatan Masyarakat Sebagai Respon Atas Program KKN UIN Sunan Kalijaga Di Jawa Timur

Mahatva Yoga Adi Pradana<sup>1\*</sup>, Muhammad Mansur<sup>2</sup>, Muhamad Faturahman<sup>3</sup>  
<sup>1,3</sup>Sosiologi Agama, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
<sup>2</sup>Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
\* mahatva.pradana@uin-suka.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memetakan model keterlibatan masyarakat dalam merespon program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Jawa Timur. KKN sebagai program pengabdian masyarakat sering kali diposisikan sebagai bentuk relasi satu arah dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Namun, studi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal bukan hanya objek, melainkan subjek aktif yang terlibat secara partisipatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan program KKN. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di beberapa desa lokasi KKN, penelitian ini mengidentifikasi beragam bentuk keterlibatan masyarakat, mulai dari partisipasi simbolik hingga kolaborasi yang bersifat transformatif. Hasil penelitian ini menawarkan model keterlibatan berbasis konteks lokal yang memperkuat prinsip kemitraan dan pemberdayaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Temuan ini juga merekomendasikan perlunya reposisi paradigma KKN agar lebih inklusif terhadap aspirasi dan kapasitas lokal.

Kata kunci: *Kemitraan berbasis konteks, Keterlibatan masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Partisipasi transformatif, Pemberdayaan lokal,*

Dikirim: 5 Agustus 2025

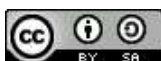
Direvisi: 4 Oktober 2025

Diterima: 10 Oktober 2025

## PENDAHULUAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah menjadi salah satu bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat. Dalam praktiknya, KKN tidak hanya menjadi ruang belajar bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi instrumen institusional dalam membangun relasi antara universitas dan komunitas lokal. Program ini lazim diterapkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di pedesaan Jawa Timur. Namun, efektivitas KKN sering kali bergantung pada bagaimana masyarakat merespons kehadiran mahasiswa dan program yang dibawa.

Selama ini, banyak studi tentang KKN lebih menekankan pada evaluasi kinerja mahasiswa atau dampak program secara sepihak. Sementara itu, suara dan dinamika masyarakat penerima program kerap kali belum diangkat secara memadai. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan maupun keberlanjutan program KKN. Oleh karena itu, penting untuk memahami model keterlibatan masyarakat sebagai respon kritis dan kreatif atas intervensi akademik ini.



Di berbagai wilayah Jawa Timur, masyarakat menunjukkan ragam cara dalam merespons program KKN. Ada yang bersikap pasif, sekadar menjadi penerima manfaat, namun tak sedikit pula yang aktif berpartisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan historis dari tiap komunitas. Hal ini membuka ruang untuk mengembangkan tipologi atau model keterlibatan yang lebih kontekstual (Setiawan, 2014).

Masyarakat bukanlah entitas homogen yang selalu menerima program luar tanpa resistensi. Dalam banyak kasus, mereka memiliki modal sosial, kearifan lokal, dan sistem nilai yang bisa memperkaya bahkan mengubah arah program KKN (Azhari 2021; Pradana and Istriyani 2020). Interaksi antara mahasiswa dan masyarakat juga membentuk dinamika timbal balik yang kompleks. Oleh karena itu, mengkaji keterlibatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek relasional dan struktural yang melatarbelakanginya.

Keterlibatan masyarakat juga perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem sosial yang dinamis. Faktor-faktor seperti kepemimpinan lokal, pengalaman sebelumnya dengan program KKN, dan jaringan sosial internal memengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia dan mampu terlibat. Oleh karena itu, model keterlibatan yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan bersifat adaptif dan tidak seragam. Model tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara fleksibel sesuai konteks lokal.

Selain itu adanya sinergi keterlibatan masyarakat telah menjadi konsep kunci dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN). Partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap program, tetapi juga sebagai cerminan dari kepemilikan dan keberdayaan komunitas lokal. Arnstein (1969) dalam teorinya tentang “*Ladder of Citizen Participation*” menekankan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat sangat bervariasi, dari manipulatif hingga kontrol masyarakat penuh. Dalam konteks KKN, pemahaman tentang posisi masyarakat dalam spektrum ini menjadi penting untuk merancang pendekatan yang partisipatif dan setara (Haines, 2014; Stoltenberg Bruursema, 2015).

Sejak diperkenalkan sebagai bagian dari pengabdian tridharma perguruan tinggi, KKN di Indonesia telah mengalami evolusi baik dalam desain maupun pelaksanaannya. Namun demikian, KKN kerap masih dipraktikkan dengan pendekatan *top-down*, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek penerima bantuan atau intervensi. Hal ini berisiko menimbulkan resistensi atau keterlibatan semu dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana relasi sosial antara mahasiswa dan warga lokal berkembang selama program KKN berlangsung, serta bagaimana relasi ini memengaruhi efektivitas program.

Pendekatan ABCD yang dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993) menawarkan paradigma alternatif dalam pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan berbasis defisit (*needs-based*), ABCD menekankan pentingnya menggali dan mengaktifkan potensi, aset, dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri. Dalam konteks KKN, pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengenali dan mengelola aset lokal seperti kepemimpinan informal, praktik budaya, lembaga sosial, dan jaringan ekonomi. ABCD memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan keterlibatan masyarakat menjadi lebih otentik dan berbasis

kekuatan komunitas (Boyd et al., 2008; Harrison et al., 2019; Mathie & Cunningham, 2003).

*Integrated Social Engagement* (ISE) adalah konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan sosial yang holistik dan berkelanjutan antara aktor eksternal (dalam hal ini mahasiswa dan universitas) dengan komunitas lokal yang dikembangkan oleh Mahatva Yoga (2023). Model ISE tidak hanya menekankan kolaborasi jangka pendek, tetapi juga pembentukan jejaring sosial, peningkatan literasi sosial, dan pertukaran pengetahuan dua arah. Dalam konteks KKN, ISE dapat memperkaya dinamika keterlibatan masyarakat dengan memposisikan mereka sebagai mitra strategis, bukan sekadar penerima manfaat. Keterlibatan sosial dalam ISE juga mencakup dimensi kultural dan afektif, yang sering kali luput dalam pendekatan teknokratis (Pradana et al., 2023).

Mengintegrasikan pendekatan ABCD dan ISE dalam praktik KKN membuka ruang bagi model keterlibatan masyarakat yang lebih reflektif, berdaya, dan berkelanjutan. ABCD menyediakan metodologi partisipatif untuk menggali kekuatan komunitas, sementara ISE menawarkan prinsip-prinsip sosial yang memungkinkan terbentuknya hubungan jangka panjang antara kampus dan masyarakat. Sinergi keduanya dapat membentuk pola keterlibatan masyarakat yang tidak hanya berbasis partisipasi aktif, tetapi juga mampu menginspirasi inisiatif lokal setelah program KKN selesai. Ini menjadi penting dalam konteks desa-desa di Jawa Timur yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang khas.

Berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program KKN sangat ditentukan oleh kepekaan mahasiswa terhadap konteks lokal. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh keberadaan tokoh informal, tradisi sosial, serta pengalaman masa lalu mereka dengan program-program sejenis. Pendekatan yang peka terhadap konteks lokal, sebagaimana diadvokasi dalam model ISE dan ABCD, mampu membentuk *trust* (kepercayaan) antara mahasiswa dan masyarakat (Mishler & Rose, 2001; Robinson, 2020). Ini juga memungkinkan transfer pengetahuan yang tidak searah, tetapi saling melengkapi.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model keterlibatan masyarakat sebagai bentuk respon atas pelaksanaan KKN di Jawa Timur. Fokus utama diarahkan pada bagaimana masyarakat memaknai kehadiran mahasiswa, terlibat dalam kegiatan, serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan program. Kajian ini penting tidak hanya bagi pengembangan program KKN itu sendiri, tetapi juga untuk memperkuat praktik pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur pengabdian masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Penelitian ini juga merefleksikan kritik terhadap model pengabdian masyarakat yang cenderung *top-down* dan tidak sensitif terhadap kapasitas lokal (Hudi Prasajo, 2013; Patta Rapanna, 2016). Model-model seperti ini sering kali mengabaikan potensi keterlibatan masyarakat secara otonom. Oleh karena itu, dengan merumuskan model keterlibatan yang berbasis pada respon dan inisiatif masyarakat sendiri, penelitian ini menekankan pentingnya kemitraan sejajar antara kampus dan komunitas. Pendekatan ini sekaligus menantang narasi dominan yang melihat masyarakat hanya sebagai objek.

Selain berkontribusi terhadap pengembangan teori partisipasi dan pemberdayaan, studi ini juga berperan sebagai refleksi praksis bagi perguruan tinggi dalam mendesain ulang program KKN. Mahasiswa tidak dapat hanya

menjadi agen perubahan yang membawa proyek dari luar, melainkan harus menjadi fasilitator yang mampu mendengarkan dan belajar dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki ruang untuk memposisikan diri sebagai mitra kritis yang aktif. Relasi inilah yang menjadi fondasi dari keterlibatan yang transformatif.

Dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana masyarakat merespons dan terlibat dalam program KKN, penelitian ini menekankan pentingnya menggeser orientasi pengabdian masyarakat dari sekadar pelaksanaan proyek menuju proses pembelajaran sosial bersama. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi dapat membangun relasi jangka panjang yang lebih bermakna dengan komunitas lokal. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat yang sejati menjadi prasyarat bagi keberhasilan program pengabdian. Inilah dasar bagi munculnya model keterlibatan yang bukan hanya responsif, tetapi juga reflektif dan berkelanjutan.

## METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami model keterlibatan masyarakat dalam merespons program KKN di beberapa desa di Jawa Timur. Lokasi dipilih secara purposif berdasarkan keberagaman geografis dan pengalaman desa dengan program KKN. Informan terdiri dari tokoh masyarakat, warga lokal, mahasiswa, dan dosen pembimbing, dengan total sekitar 25 orang yang dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi selama tiga bulan. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika, termasuk informed consent dan kerahasiaan identitas partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Model Keterlibatan Masyarakat dalam Program KKN di Beberapa Desa di Jawa Timur (data diolah peneliti)

No	Nama Desa	Bentuk Keterlibatan Masyarakat	Peran Aktor Lokal	Model Keterlibatan	Keterangan Tambahan
1.	Desa Ngawonggo (Kab. Malang)	Ikut dalam perencanaan kegiatan, menyediakan logistik	Kepala desa, karang taruna	<b>Kolaboratif Adaptif</b>	Warga terlibat aktif sejak awal; dukungan logistik kuat
2.	Desa Karanganyar (Kab. Malang)	Menghadiri acara, menyediakan tempat tinggal mahasiswa	Tokoh agama	<b>Partisipasi Simbolik</b>	Tidak ada keterlibatan dalam isi program

No	Nama Desa	Bentuk Keterlibatan Masyarakat	Peran Aktor Lokal	Model Keterlibatan	Keterangan Tambahan
3.	Desa Carangrejo (Kab.Ponorogo)	Merancang kegiatan bersama mahasiswa (pelatihan UMKM)	Kader PKK, guru sekolah	<b>Transformasional</b>	Program berlanjut setelah KKN selesai
4.	Desa Sironboyo (Pacitan)	Hanya mengikuti kegiatan penutupan	Perangkat desa saja	<b>Medium</b>	Kegiatan mahasiswa berjalan tanpa partisipasi warga
5.	Desa Tamansari (Kab.Ponorogo)	Terlibat dalam festival budaya bersama mahasiswa	Pemuda desa, pegiat seni	<b>Kolaboratif Adaptif</b>	Tradisi lokal diangkat dalam program KKN
6.	Desa Ploso (Pacitan)	Memberi masukan dan membantu evaluasi program	Ketua RT, ibu rumah tangga	<b>Transformasional</b>	Ada perubahan tata kelola kebersihan desa

Model keterlibatan masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, pada tahap partisipasi simbolik, keterlibatan warga hanya sebatas hadir dalam kegiatan, seperti mengikuti acara seremonial atau menjadi penonton tanpa memberikan kontribusi nyata. Tahap kolaboratif adaptif, mulai terbentuk kerja sama antara mahasiswa dan masyarakat, meskipun inisiatif dan kendali program masih lebih banyak berasal dari mahasiswa. Pada tahap transformasional, masyarakat berperan aktif sebagai mitra sejajar, program yang dijalankan bersifat berkelanjutan, serta melahirkan inisiatif-inisiatif baru dari warga sendiri. Pada kategori medium, keterlibatan masyarakat sudah cukup bermakna, meskipun belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian. Secara keseluruhan, model ini menggambarkan dinamika partisipasi masyarakat, mulai dari keterlibatan yang bersifat pasif hingga berkembang menjadi peran aktif dalam menggerakkan perubahan.

#### A. Variasi Tingkat Keterlibatan Masyarakat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sangat beragam antar desa di Jawa Timur. Beberapa desa menunjukkan keterlibatan yang bersifat minimal dan bersandar pada bantuan teknis semata, seperti penyediaan tempat tinggal atau logistik. Di sisi lain, ada pula desa-desa yang memperlihatkan pola keterlibatan yang jauh lebih partisipatif, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga refleksi bersama setelah program selesai. Perbedaan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, sejarah relasi dengan

institusi pendidikan tinggi, serta kualitas komunikasi awal antara mahasiswa dan warga.

Sebagaimana tercermin dalam pendekatan *Integrated Social Engagement* (ISE), keterlibatan tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan fisik, melainkan sebagai proses relasional yang ditopang oleh rasa percaya, kesetaraan, dan saling belajar. Desa-desa yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam menerima KKN, terutama yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan, cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih dalam. Hal ini selaras dengan semangat pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*), di mana masyarakat tidak dilihat sebagai objek pasif, melainkan sebagai pemilik sumber daya dan aktor perubahan sosial (Stoltenberg Bruursema, 2015).

Dalam salah satu wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Ngawonggo, Kab. Malang, terungkap refleksi yang kaya tentang keterlibatan yang tumbuh dari relasi sosial, bukan hanya agenda formal program:

“Waktu awal anak-anak KKN datang, saya tanya: ‘Apa yang ingin kalian bawa ke sini?’ Tapi saya juga bilang, ‘Apa yang ingin kalian pelajari dari kami?’ Karena kami ini bukan ladang praktik. Kami ini manusia, punya nilai, punya pengalaman. Waktu saya lihat mereka mau duduk di pos ronda, ikut kerja bakti, ikut tahlilan, saya tahu ini anak-anak yang mau belajar. Jadi kami juga membuka ruang, ngajak mereka rembukan, bukan sekadar nyuruh ini-itu. Jadi ya, kalau dari awal sudah dibangun hubungan, nanti kegiatan itu jalan dengan sendirinya.” (wawancara ketua RT, Juli 2025)

Kutipan ini menegaskan bahwa keterlibatan warga tidak bisa direkayasa secara teknokratik. Ia tumbuh dari proses pengenalan dan penghormatan timbal balik. Ketika mahasiswa hadir bukan sebagai “pemberi solusi” melainkan sebagai bagian dari komunitas yang ingin tumbuh bersama, maka warga pun terdorong untuk terlibat lebih aktif. Di desa ini, warga bahkan ikut merancang program edukasi lingkungan dan mendampingi mahasiswa saat melakukan survei rumah tangga. Mereka tidak hanya menjadi “sasaran”, melainkan juga fasilitator, penggerak, dan narasumber lokal.

Sebaliknya, di desa yang tidak memiliki hubungan kuat dengan pihak kampus, keterlibatan masyarakat cenderung terbatas dan bersifat transaksional. Salah satu warga desa Ploso, Pacitan menyampaikan:

“Jujur saja, saya tidak begitu tahu KKN ini tujuannya apa. Mereka datang, bawa program, terus minta warga bantu. Tapi nggak ada tanya-tanya dulu. Kami jalani saja, tapi ya sebatas bantu makan atau tempat tinggal. Habis dua bulan, mereka pulang. Nggak tahu hasilnya gimana.” (wawancara narasumber warga R, pada Juli 2025)

Kontras ini memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi sejak awal dan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Tanpa kejelasan arah, tanpa proses mendengar, keterlibatan warga bisa menjadi simbolik belaka. Pendekatan ISE membantu memetakan bahwa masyarakat memiliki berbagai tingkat kesiapan dan kapasitas sosial yang perlu dihargai, bukan diseragamkan. Oleh karena itu, variasi tingkat keterlibatan ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas KKN bukan dari sisi output kegiatan semata, tetapi dari kualitas hubungan sosial yang dibangun. Pendekatan berbasis aset (ABCD) dan keterlibatan sosial terpadu

(ISE) dapat menjadi kerangka kerja yang strategis dalam merancang KKN yang lebih partisipatif, etis, dan kontekstual.

### B. Aset Sosial sebagai Motor Partisipasi

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menekankan bahwa pengembangan masyarakat yang berkelanjutan harus dimulai dari pengakuan terhadap aset yang sudah dimiliki oleh komunitas, bukan dari identifikasi kekurangannya. Dalam konteks pelaksanaan KKN di Jawa Timur, pendekatan ini terbukti menjadi fondasi penting dalam membangun partisipasi warga. Di beberapa desa, keterlibatan aktif warga muncul ketika mahasiswa KKN secara sadar melibatkan aset lokal—baik individu, kelompok komunitas, maupun sumber daya budaya dan alam—sejak awal program.

Salah satu contoh kuat datang dari Desa Ploso, sebuah desa pesisir di Kabupaten Pacitan. Di sana, mahasiswa KKN memulai program dengan mengadakan pemetaan sosial partisipatif, mengidentifikasi tokoh lokal yang aktif di bidang lingkungan, serta kelompok perempuan pengrajin kerang yang selama ini tidak terlibat dalam kegiatan desa. Kolaborasi ini melahirkan program edukasi ekologi pesisir berbasis lokal, seperti penyuluhan pengelolaan sampah plastik dan pelatihan daur ulang kerajinan berbahan limbah laut.

Seorang ibu pengrajin bernama Bu MN, yang menjadi penggerak dalam program tersebut, menyampaikan pengalamannya dalam wawancara:

“Anak-anak KKN ini beda, Mas. Mereka datang bukan langsung kasih program. Mereka keliling dulu, ngobrol sama kami, tanya-tanya soal laut, soal kerang, soal sampah. Saya kaget, biasanya kami dianggap orang pinggiran, tapi mereka malah ngajak kami jadi pelatih, bukan peserta. Itu yang bikin kami semangat. Dari situ kami bareng-bareng bikin pelatihan, ngajarin anak muda cara bersihin cangkang kerang jadi barang hias. Ini bukan program mereka saja, tapi program kami juga.”( wawancara narasumber Agustus 2025)

Kutipan Bu MN menunjukkan bahwa pengakuan terhadap aset sosial tidak hanya mendorong partisipasi, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri komunitas yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan ABCD bukan sekadar metode teknis, melainkan cara untuk membalik narasi dominan pembangunan yang kerap memosisikan masyarakat sebagai pihak yang pasif dan “kurang”. Justru dari pengakuan atas kemampuan lokal inilah muncul energi partisipasi yang otentik.

Di desa lain, pendekatan serupa diterapkan dengan memanfaatkan keberadaan karang taruna sebagai motor kegiatan anak muda. Mahasiswa KKN di Desa Karanganyar, Kab Malang telah berhasil menginisiasi festival budaya desa kecil dengan melibatkan kelompok seni remaja lokal. Program ini muncul dari pertemuan informal dan diskusi terbuka yang difasilitasi mahasiswa sebagai bagian dari proses pengenalan aset. Seorang pemuda karang taruna, MM mengatakan:

“Biasanya kalau ada program luar, kami cuma jadi panitia angkut kursi atau jaga parkir. Tapi kali ini kami diajak mikir: potensi desa kita apa, budaya kita apa yang bisa ditampilkan. Mahasiswa KKN-nya juga nggak sok pinter, mereka duduk bareng kami, minta masukan. Jadi kami merasa punya peran. Festival kecil-kecilan itu, walau sederhana, tapi bikin kami bangga sama kampung sendiri.” (wawancara narasumber Agustus 2025)

Keterlibatan seperti ini menunjukkan bahwa aset sosial bukan sekadar sumber daya, melainkan juga jembatan emosional yang memperkuat kohesi sosial dan membangun kepercayaan lintas kelompok. Dalam kerangka ISE (*Integrated Social Engagement*), aset sosial menjadi landasan bagi relasi timbal balik yang setara antara mahasiswa dan warga. Dengan demikian, pemetaan dan pengaktifan aset lokal bukan hanya langkah teknis awal, melainkan strategi transformatif dalam memperkuat otonomi masyarakat. Ketika komunitas merasa dihargai dan diberdayakan, mereka akan lebih terbuka dan berinisiatif untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Pendekatan ABCD secara nyata menggeser posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan—dan dalam konteks KKN, ini berarti membentuk relasi pembelajaran bersama, bukan hubungan satu arah.

### C. Peran Aktor Lokal dan Kepemimpinan Komunitas

Salah satu temuan penting dalam pelaksanaan KKN di berbagai wilayah Jawa Timur adalah bahwa kehadiran tokoh lokal yang visioner sering kali menjadi katalis dalam membangun keterlibatan masyarakat secara luas. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa KKN dan warga desa, tetapi juga berperan strategis dalam memberikan legitimasi sosial terhadap program-program yang diinisiasi. Legitimasi ini menjadi penting, terutama dalam komunitas yang memiliki struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang kuat.

Dalam banyak kasus, mahasiswa KKN menemukan bahwa keberhasilan program bukan semata ditentukan oleh kualitas teknis atau inovasi gagasan, tetapi justru oleh seberapa besar kepercayaan warga terhadap tokoh lokal yang terlibat dalam proses tersebut. Tokoh lokal berperan sebagai penjaga norma sosial sekaligus fasilitator perubahan. Kehadiran mereka mengkondisikan suasana dialogis, memecah resistensi kultural terhadap ide baru, dan memediasi kesalahpahaman antara pihak luar (mahasiswa) dan komunitas setempat (Ufie, 2017; Ummatin, 2014).

Hal ini selaras dengan pendekatan ISE (*Integrated Social Engagement*) yang menekankan pentingnya membangun relasi sosial jangka panjang dalam setiap bentuk keterlibatan. Pendekatan ini menolak gagasan keterlibatan sebagai sesuatu yang linier dan teknokratis. Sebaliknya, ia memandang bahwa relasi adalah infrastruktur utama dari program sosial. Dengan kata lain, program yang sukses adalah program yang terlebih dahulu mengelola hubungan—bukan hanya menyelesaikan target teknis. Seorang tokoh masyarakat dari Desa Ngawonggo Pak AW, menggambarkan perannya dalam mengawal program KKN:

“Anak-anak KKN kadang datang bawa program besar, tapi tidak tahu karakter warga. Saya selalu bilang: jangan buru-buru. Ajak ngopi dulu, masuk ke kelompok tani, ikut kerja bakti. Baru nanti bicara soal program. Kalau warga sudah percaya, mereka akan bantu dengan ikhlas. Tapi kalau merasa dijalkan dari luar, mereka bisa diam saja. Saya bantu menjembatani itu—saya ikut musyawarah, saya jelaskan ke warga, dan saya juga kontrol anak-anak KKN supaya jalan bareng warga, bukan jalan sendiri.” (wawancara narasumber Agustus 2025)

Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya sosok seperti Pak AW dalam membangun ruang dialog dan menyatukan arah gerak antar pihak. Ia tidak hanya



menjadi penerjemah gagasan, tetapi juga aktor moral yang memvalidasi bahwa kegiatan mahasiswa layak untuk diikuti dan didukung. Lebih lanjut, karakter tokoh lokal yang visioner biasanya ditandai oleh kapasitas untuk melihat manfaat jangka panjang, keterbukaan terhadap perubahan, dan kemampuan untuk merangkul berbagai lapisan masyarakat. Dalam banyak desa yang diteliti, kehadiran tokoh agama, ketua RT, kepala dusun, atau penggerak karang taruna yang memiliki orientasi ke depan sangat menentukan arah keberhasilan kegiatan.

Misalnya, wilayah Ponorogo mahasiswa KKN berhasil mengembangkan program literasi digital berbasis masjid karena didukung penuh oleh seorang ustaz muda yang aktif di komunitas pemuda. Mahasiswa awalnya kesulitan menjangkau pemuda desa yang kurang tertarik pada program edukasi. Namun berkat tokoh tersebut, kegiatan bisa terintegrasi ke dalam rutinitas keagamaan dan sosial desa. Seperti disampaikan oleh mahasiswa KKN di lokasi tersebut:

“kak Zaki bukan hanya menyambut kami, tapi juga yang pertama kali mengundang kami bicara di pengajian remaja. Dia bantu bikin jadwal, ajak anak-anak muda datang, bahkan bantu cari WiFi. Padahal sebelumnya kami bingung harus mulai dari mana. Tanpa dia, mungkin program kami cuma jadi flyer di pos ronda.”  
(wawancara narasumber Agustus 2025)

Contoh ini memperjelas bahwa keterlibatan sosial adalah proses yang sangat kontekstual, dipengaruhi oleh jaringan relasi yang sudah eksis dalam masyarakat. Model ISE membantu memahami bahwa dalam konteks komunitas yang kompleks, legitimasi sosial lebih penting daripada kecepatan pelaksanaan. Tanpa dukungan dari aktor penghubung yang memiliki kepercayaan masyarakat, program eksternal akan cenderung menghadapi resistensi atau ketidakpedulian. Dengan demikian, kehadiran tokoh lokal visioner bukan hanya pelengkap, tetapi komponen esensial dalam desain keterlibatan masyarakat. Mereka adalah arsitek informal dari struktur sosial yang menghidupkan atau mematikan keberhasilan program pengabdian berbasis masyarakat.

#### **D. Partisipasi Simbolik vs. Partisipasi Substantif**

Meskipun partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pelaksanaan program KKN berbasis pendekatan ABCD dan ISE, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat keterlibatan yang signifikan antar desa dan kelompok sasaran. Di sejumlah lokasi, keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat simbolik. Warga tampak hadir dalam forum musyawarah, mengikuti kegiatan pelatihan, atau mendukung acara sosial, namun tidak memiliki pengaruh nyata dalam perumusan maupun arah program yang dijalankan.

Partisipasi semacam ini mencerminkan kritik klasik Sherry R. Arnstein dalam tulisannya *"A Ladder of Citizen Participation"* (1969), yang membedakan antara partisipasi semu (*tokenism*) dan partisipasi penuh (*citizen power*). Dalam pandangan Arnstein, bentuk partisipasi simbolik hanya menempatkan warga sebagai pelengkap yang "dilibatkan" secara permukaan, tanpa akses terhadap pengambilan keputusan yang substantif. Dalam konteks KKN, hal ini terlihat ketika mahasiswa telah menyusun program sejak awal sebelum kedatangan, dan hanya meminta persetujuan atau kehadiran warga tanpa melibatkan mereka dalam tahap diagnosis kebutuhan atau desain kegiatan (Mudjia Rahardjo, 2018; Panjaitan & Sundawa, 2016).

Namun demikian, praktik keterlibatan yang lebih kolaboratif dan deliberatif juga ditemukan di beberapa lokasi. Di Desa Karanganyar, misalnya, mahasiswa dan warga melakukan *asset mapping* (Fauzi & Battour, 2024; Leclerc, 2020) bersama sejak minggu pertama, mengidentifikasi potensi desa dalam bidang pertanian organik dan kerajinan lokal. Dari proses tersebut lahirlah kegiatan pelatihan pupuk cair berbasis limbah dapur dan pengembangan branding produk kerajinan tangan, yang sepenuhnya difasilitasi oleh warga dan didukung oleh mahasiswa sebagai mitra teknis.

Seorang ketua kelompok tani dari desa tersebut menyampaikan:

"Anak-anak KKN datang tidak langsung bawa proposal. Mereka malah minta kami cerita soal kegiatan tani, soal kendala, soal musim tanam. Dari situ kami merasa dihargai. Akhirnya kami usulkan bikin pelatihan buat pupuk cair karena memang itu yang kami butuh. Mereka bantu carikan cara dan narasumber. Jadi kami bareng-bareng susun, bukan cuma disuruh hadir." (wawancara narasumber Agustus 2025)

Kutipan ini memperlihatkan praktik *co-creation* yang menjadi esensi dari pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* dan *Integrated Social Engagement (ISE)*. Dalam kerangka ini, warga bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif yang mengartikulasikan kebutuhan dan potensi mereka sendiri, serta turut membentuk bentuk akhir dari program pengabdian. Perbedaan antara keterlibatan simbolik dan kolaboratif juga menunjukkan adanya kesenjangan kesadaran dan kompetensi dalam pengelolaan relasi sosial. Beberapa mahasiswa KKN datang dengan kerangka pikir proyek (*project mindset*) yang terpusat pada pencapaian output, sementara yang lain mengadopsi pendekatan prosesual yang menekankan pentingnya membangun relasi, kepercayaan, dan dialog partisipatif.

Berdasarkan kerangka ISE, keberhasilan keterlibatan ditentukan oleh *mutual recognition* (Pradana & Istriyani, 2020) dan *relational accountability* (Butts, 2008; Howe et al., 2018)—yakni sejauh mana kedua belah pihak (warga dan mahasiswa) saling mengakui kapasitas masing-masing dan berbagi tanggung jawab atas keberhasilan kegiatan. Pendekatan ini bukan hanya mendorong otonomi masyarakat, tetapi juga membentuk ruang sosial baru di mana mahasiswa belajar mengenai demokrasi lokal, negosiasi nilai, dan pentingnya empati sosial dalam praktik pemberdayaan.

Dengan demikian, menghindari bentuk keterlibatan semu bukan hanya merupakan kritik etis, tetapi menjadi langkah strategis dalam menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan. Keterlibatan sejati tidak ditandai oleh banyaknya warga yang hadir, tetapi oleh kemampuan warga untuk menyuarakan aspirasi, membentuk keputusan, dan mengklaim program sebagai bagian dari kepemilikan kolektif mereka.

Berdasarkan temuan lapangan, keterlibatan masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama. Pertama, Model Respon Pasif, di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat tanpa keterlibatan aktif dalam perencanaan maupun evaluasi program. Keterlibatan mereka bersifat simbolik, terbatas pada kehadiran atau dukungan logistik tanpa memiliki ruang pengambilan keputusan. Kedua, Model Partisipatif Terbimbing, menggambarkan situasi ketika masyarakat mulai terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan memiliki peran terbatas dalam pengambilan

keputusan. Keterlibatan ini biasanya difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat atau oleh mahasiswa yang aktif membangun komunikasi dengan warga. Ketiga, Model Kolaboratif Transformatif, menunjukkan bentuk keterlibatan yang paling ideal, di mana masyarakat menjadi mitra sejajar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Dalam model ini, masyarakat memimpin inisiatif lokal dan bahkan mampu melanjutkan serta mengembangkan dampak program setelah mahasiswa KKN meninggalkan lokasi. Model terakhir ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip pendekatan *Integrated Social Engagement* (ISE) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang menekankan pentingnya membangun relasi sosial jangka panjang dan memberdayakan aset lokal. Dalam kerangka ini, intervensi eksternal seperti KKN tidak dimaksudkan sebagai solusi tunggal, tetapi sebagai katalisator untuk mendorong transformasi sosial yang berbasis pada kekuatan dan kapasitas komunitas itu sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program KKN UIN Sunan Kalijaga di wilayah Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh struktur sosial lokal, kepemimpinan komunitas, dan kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan yang setara dengan warga. Terdapat variasi tingkat keterlibatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model: respon pasif, partisipatif terbimbing, dan kolaboratif transformatif. Model terakhir menunjukkan potensi terbesar dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan karena memosisikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan lokal. Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dan *Integrated Social Engagement* (ISE) terbukti efektif dalam memfasilitasi model keterlibatan yang lebih dalam dan transformatif, dengan menekankan pada pemanfaatan aset lokal, relasi sosial, dan partisipasi berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, keberhasilan program KKN tidak hanya diukur dari output teknis, tetapi juga dari sejauh mana ia membentuk proses belajar bersama, memperkuat kapasitas komunitas, dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap perubahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan riset ini. Dukungan tersebut memungkinkan penelitian ini berjalan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan laporan akhir. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan model keterlibatan masyarakat dalam program KKN serta mendukung visi UIN Sunan Kalijaga sebagai universitas yang unggul dan inklusif dalam pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AZHARI, F. (2021). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Jaringan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 71–79.

- Boyd, C. P., Hayes, L., Wilson, R. L., & Bearsley-Smith, C. (2008). Harnessing the social capital of rural communities for youth mental health: An asset-based community development framework. *Australian Journal of Rural Health, 16*(4), 189–193.
- Butts, C. T. (2008). A relational event framework for social action. *Sociological Methodology, 38*(1), 155–200. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9531.2008.00203.x>
- Fauzi, M. A., & Battour, M. (2024). Halal and Islamic tourism: science mapping of present and future trends. *Tourism Review*.
- Haines, A. (2014). Asset-based community development. In *An introduction to community development* (pp. 67–78). Routledge.
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: narratives, practice, and conditions of possibility—a qualitative study with community practitioners. *Sage Open, 9*(1), 2158244018823081.
- Howe, D., Kohli, R., Smith, M., Parkinson, C., McMahon, L., Solomon, R., Simmonds, J., Cooper, A., Dutton, J., & Fairtlough, A. (2018). *Relationship-based social work: Getting to the heart of practice*. Jessica Kingsley Publishers.
- Hudi Prasajo, Z. (2013). Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21*(2), 417–436. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/viewFile/252/233>
- Leclerc, É. (2020). Ville intelligente et e-gouvernance en Inde, cartographier un nouveau paysage urbain. *Mappemonde, 128*, 0–17. <https://doi.org/10.4000/mappemonde.4227>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice, 13*(5), 474–486.
- Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. *Comparative Political Studies, 34*(1), 30–62.
- Mudjia Rahardjo. (2018). Interaksionisme Simbolik Dalam Penelitian Kualitatif. *Repository.Uin-Malang, March*, 1–5. [repository.uin-malang.ac.id](https://repository.uin-malang.ac.id)
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts, 3*(2), 64–72.
- Patta Rapanna, S. E. (2016). *MEMBUMIKAN KEARIFAN LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Pradana, M. Y. A., & Istriyani, R. (2020). Sepakat-sepakat: modal sosial politik masyarakat kalitekuk dalam mewujudkan Desa wisata. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6*(2), 138–149.
- Pradana, M. Y. A., Wisadirana, D., & Hakim, M. L. (2023). Integration of Islamic Religious Values and Javanese Culture in the Development of Pilgrimage Tourism in Ngawonggo, Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 11*(6), 132–141.

- Robinson, S. C. (2020). Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI). *Technology in Society*, 63, 101421.
- Setiawan, E. (2014). Keterlibatan Kiai Dalam politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 1–17.
- Stoltenberg Bruursema, C. (2015). Asset-based community development: A path toward authentic community development practice. *SPNHA Review*, 11(1), 7.
- Ufie, A. (2017). Mengonstruksi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam pembelajaran muatan lokal sebagai upaya memperkuat kohesi sosial (studi deskriptif budaya Niolilieta .... *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 23(2), 79–89. <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/download/10157/4844>
- Ummatin, K. (2014). Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 15(1), 179–205. <https://www.neliti.com/publications/76363/tiga-model-interaksi-dakwah-rasulullah-terhadap-budaya-lokal>